

PENGARUH PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 2018-2021

Syafidra Amelia¹, Yuni Sukandani², Fauziyah³

Email correspondence: syafidraamelia81@gmail.com

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRACT

Regional taxes are mandatory contributions to regions owed by individuals or entities that are coercive under the law. Bphtb and PBB-P2 are the largest local tax revenues. The purpose of this study was to determine how much influence Bphtb and PBB-P2 had on local tax results in Sidoarjo district in 2018-2021. The population is the financial report of the Sidoarjo district tax results, totaling 18 districts in 2018-2021 so that a sample of 8 districts is obtained from the specified criteria. Data collection using documentation. The method of analysis used multiple linear regression. The results of the coefficient of determination test show that the independent variable has an impact on the dependent variable 88.8% while the remaining 11.2% is influenced by other variables outside this model. The results of the t test show that Bphtb has an impact on local tax results ($0.000 < 0.05$) and PBB-P2 also has an impact on local tax results ($0.000 < 0.05$). While the F test shows that Bphtb and PBB-P2 simultaneously have an impact on local tax results ($0.000 < 0.05$).

Keywords : : BPHTB, PBB-P2, local tax results

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan dan mengelola potensi masing-masing yang ada di daerah tersebut untuk kemakmuran. Salah satu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga secara langsung juga mengelola BPHTB dan PBB-P2 untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui pengaruh PBB dan BPHTB terhadap hasil pajak daerah serta pengaruh BPHTB dan PBB-P2 secara simultan terhadap hasil pajak daerah setelah pemungutan

kedua pajak tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasinya menggunakan laporan keuangan hasil pajak daerah tahun 2018-2021. Pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling sehingga didapat 8 kecamatan, sumber data didapat dari Badan pendapatan daerah kabupaten Sidoarjo.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Teknik analisis data memakai asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), dan hipotesis dengan t-test dan F-test.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas:

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,05778918
Most Extreme Differences	Absolute	0,110
	Positive	0,082
	Negative	-0,110
Test Statistic		0,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Dari tabel diatas, didapatkan nilai 0,200 > 0,05 yang berarti uji tersebut berdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

Coefficients ^a				Sig.	Collinearity Statistics
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients ^t			
	B	Std. Error	Beta		Tolerance VIF
1	(Constant) - ,028	,028	-1,004	,324	

Bphtb	,232	,055	,347	4,256	,000	,544	1,838
PBB-P2	,387	,047	,677	8,315	,000	,544	1,838

Dari tabel tersebut, didapatkan nilai tolerance dari BHTB dan PBB-P2 ialah $>0,10$. Serta VIF yang didapat <10 . Sehingga kesimpulannya ialah model regresi terbebas dari gejala multikolonieritas.

3) Uji Autokolerasi

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,946 ^a	,895	,888	,06381	1,449

Dari tabel tersebut, didapatkan nilai DW sebesar 1,449 sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan Durbin Watson yaitu berada di antara $-2 \leq 1,449 \leq 2$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi terhadap data yang di uji.

4) Uji Heterokedastisitas

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients ^t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,034	,016		2,066 ,048
	Bphtb	-,001	,032	-,006	-,025 ,980
	PBB-P2	,024	,027	,216	,880 ,386

Dapat dilihat dari gambar diatas, diketahui titik observasi menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y. untuk itu, model regresi tersebut bebas dari gejala Heterokedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5 Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,028	,028		-1,004	,324
	Bphtb	,232	,055	,347	4,256	,000
	PBB-P2	,387	,047	,677	8,315	,000

Dari tabel diatas, persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -0,028 + 0,232 X_1(\text{BPHTB}) + 0,387 X_2(\text{PBB-P2}) + e$$

Persamaan diatas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien

Nilai koefisien konstanta (α)-0,028 artinya apabila nilai variabel bebas BPHTB (X_1) dan PBB-P2 (X_2) bernilai nol (0), maka hasil pajak daerah (Y) sebesar 0,028

2. Variabel BPHTB memiliki nilai koefisien regresi 0,232

3. PBB-P2 mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,387

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien	R	,946
Determinasi	R Square	,895
(R ²)	Adjusted R Square	,888

Dari tabel diatas, diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,888(88,8%) artinya variabel bebas berdampak pada variabel terikat sebesar 88,8%, sementara 11,2% sisanya dipengaruhi variabel lain.

Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

Variabel	t _{hitung}	Sig.	keterangan
BPHTB	7,397	,000	Hipotesis diterima
PBB-P2	12,103	,000	Hipotesis diterima

Sumber: Output SPSS 23, data diolah

Dari tabel diatas, dijelaskan sebagai berikut:

- BPHTB didapat nilai t_{hitung} sebesar 7,397 dengan sig. sebesar 0,000, maka nilai sig. 0,000 < taraf sig. 0,05, berarti H_1 diterima. Berarti BPHTB berdampak pada hasil pajak daerah. Hipotesis diterima.
- PBB-P2, didapat nilai t_{hitung} sebesar 12,103 dengan sig. sebesar 0,000, maka nilai sig. 0,000 < taraf sig. 0,05, berarti H_2 diterima. Berarti PBB-P2 berdampak pada hasil pajak daerah. Hipotesis diterima.

2) Uji F (Simultan)

Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut :

F _{hitung}	Sig.	Keterangan
124,066	,000 ^b	Hipotesis diterima

Sumber: Output SPSS 23, data diolah

Dari tabel diatas, didapat nilai F_{hitung} sebesar 124,066 dengan sig. 0,000, maka nilai sig.0,000 < taraf sig.0,05, berarti H₃ diterima. Berarti BPHTB dan PBB-P2 secara bersama berdampak pada Hasil Pajak Daerah. Hipotesis diterima.

KESIMPULAN

Dari beragam upaya dalam menganalisis data yang sudah dilaksanakan bisa di simpulkan bahwasanya:

1. Variabel sanksi administrasi (X1) diketahui dalam uji t hasil signifikansi $0,000 < 0,05$, jadi sanksi administrasi dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB sehingga H1 diterima.
2. Variabel pelayanan (X2) diketahui dalam uji t hasil signifikansi $0,004 < 0,05$, jadi layanan dinyatakan mempunyai pengaruh pada tingkat rasa patuh pembayaran PBB sehingga H2 diterima.
3. Variabel kesadaran wajib pajak (X3) diketahui dalam uji t hasil signifikansi $0,004 < 0,05$, jadi kesadaran perorangan dengan kewajiban perpajakan dinyatakan mempunyai pengaruh pada tingkat rasa patuh pembayaran PBB sehingga H3 diterima.
4. Variabel konsekuensi administrasi, layanan serta tingkat rasa sadar perorangan dengan kewajiban perpajakan dalam uji F diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka sanksi administrasi, pelayanan, dan kesadaran wajib pajak dinyatakan berpegaruh secara simulta terhadap kepatuhan pembayaran PBB sehingga H4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia dkk, (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.31 No.1 Universitas Brawijaya.
- Cahyadi dkk, (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana, 16(3) 2342-2373.
- Devano, S. D. (2017). *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harfika dan Abdullah (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, Balance, XIV(1), 44-56.
- Herlina, Vivi. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.

- Lestari dkk (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar). Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mardiasmo, MBA., AK (2018), *Perpajakan. Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Penerbit:Andi.
- Marni Sulistyowati (2018)Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). Jurnal Ilmu Akuntansi. Universitas Muara Bungo. Jambi.
- Pratiwi, Iga Cyndi. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Tigaraksa). Universitas Multimedia Nusantara Tangerang.
- Siregar dkk (2016). Pengaruh Pelayanan Fiksus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Semarang). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro. Vol 1 No.1.
- Siti Kurnia Rahayu, (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Penerbit Rekayasa Bisnis: Bandung.
- Syaiful, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Koto Tengah Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(2).
- Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan.